



BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, berkat rakhmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

LAKIP tahun 2013 ini merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam program dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi serta penjabarannya.



LAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali merupakan proses penyusunan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini dituangkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini seiring dengan agenda penyusunan dan kebijhakan anggaran, serta kewajiban bagi setiap instansi (satker) dalam tahun anggaran yang telah ditentukan

Substansi dari LAKIP ini adalah mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dalam tahun 2013 dikaitkan dengan proses pencapain tujuan dan sasaran strategis 2010-2014 yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat di bidang kebudayaan. Semoga laporan ini ada manfaatnya bagi pelestarian (pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan) kebudayaan daerah khususnya dan kebudayaan nasional umumnya.

Denpasar, 6 Januari 2014

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya

Bali,

Drs. / Made Purna, M.Si. NJP 195912311987101001

KAN DAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL	
KEBUDAYAAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013	16
C. PENETAPAN KINERJA	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013	19
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	19
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV PENUTUP	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali merupakan proses penyusunan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini dituangkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana kinerja ini seiring dengan agenda penyusunan dan kebijhakan anggaran, serta kewajiban bagi setiap instansi dalam tahun anggaran yang telah ditentukan

Substansi dari LAKIP ini adalah mengkomunikasikan capaian kierja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dalam tahun 2013 dikaitkan dengan proses pencapain tujuan dan sasaran strategis 2010-2014 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, diharap bahwa LAKIP akan memberikan suatu gambaran mengenai kinerja suatu intenasi atau lembaga, khusus Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang terkait dengan kebudayaan dan pendidikan.

Kebudayaan merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu, budaya bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya nasional dalam bentuk-bentuk kearifan lokal yang menjadi nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik dan unik.

Sasaran Pembangunan Kebudyaan Tahun 2014. Mewujudkan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudi luhur dan berakhlak mulia yang ditandai dengan:

- 1. meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh, diantaranya melalui internalisasi nilai budaya;
- 2. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam kreativitas berkesenian masyarakat, diantaranya penyelenggaraan even kesenian dan perfilman;
- 3. meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya, diantaranya melalui fasilitasi produksi film pendek dan film dokumenter;
- 4. meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten, diantaranya melalui revitalisasi Taman Budaya;
- 5. meningkatnya kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, diantaranya melalui revitalisasi museum, pembangunan museum, pengelolaan cagar budaya, registrasi cagar budaya, dan revitalisasi cagar budaya;
- 6. meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan;

Dari segi geografis wilayah Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali (PBNB) cukup bervariasi, yaitu dari arah barat (Provinsi Bali) sebagai daerah yang paling subur, daerah yang paling timur (NTT) dari yang kurang subur hingga yang kering kerontang. Kondisi yang bervariasi demikian itu, juga sangat berpengaruh terhadap sikap mental (pengetahuan budaya), etika, dan ekspresi budaya yang dimilikinya. Demikian pula agama sebagai penuntun hidup juga menunjukkan keragaman dari arah barat (Provinsi Bali) yang penduduknya mayoritas beragama Hindu, penduduk NTB mayoritas beragama Islam, dan yang paling timur (NTT) sebagian besar beragama Kristen (Protestan Katolik). Dari aspek agama ini pun ikut memberikan andil terbentuknya karakter dan kebijaksanaan pembangunan budaya dari suku bangsa yang ada di ketiga wilayah PBNB tersebut.

Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam memperkokoh ketahanan budaya dan keutuhan nasional dari konflik horisontal maupun vertikal yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Suatu kenyataan bahwa Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang mewilayahi 3 Provinsi yakni Provinsi Bali, NTB, dan NTT yang dihuni kurang lebih 58 suku bangsa di antaranya Bali 4 suku bangsa, NTB 9 suku bangsa dan NTT 45 suku bangsa, yang tersebar di gugusan kepulauan Nusa Tenggara yang sering disebut "Sunda Kecil". Kenyataan inilah yang merupakan tantangan dari Balai Pelestarian dalam upaya turut mempertahankan keutuhan-keutuhan baik dari konflik horisontal maupun vertikal yang sering muncul akhir-akhir ini. Di sisi lain adat dan budaya dari setiap suku bangsa yang semula mampu sebagai perekat persatuan, kini sudah semakin memudar dengan sistem standarisasi atau keseragaman yang diterapkan selama ini. Kretivitas tersumbat akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai budaya yang dimiliki.

Perlunya pemahaman multikultur di masyarakat. Hal ini paling tidak untuk mencegah atau mengurang ancaman dan gangguan bagi kedaulatan dan keamanan nasional sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis yang sangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter dan kebangsaan terutama pemahaman mengenai masalah multikulturalisme.

Pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan menunjang pula dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan secara arif dan berkelanjutan serta keragaman pesona keindahan alam sebagai wilayah bahari diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa sehingga membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Program pelestarian budaya pelaksanaannya teknisnya berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diampu oleh 11 BPNB sebagai UPT termasuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Program ini bertujuan untuk melestarikan, melindungi dan menumbuhkan (memanfaatkan) budaya yang ada di Indonesia sebagai suatu identitas milik bangsa Indonesia. Berikut tingkat ketercapaian

sasaran strategis untuk program pelestarian budaya, di mana ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utamanya.

Sasaran Strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film, capaian realisasinya didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja. Satu (1) indikator kinerja capaian realisasi: indikator (3) jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya melebihi terealisasi 166,25 % yaitu: Jumlah peserta atau orang yang hadir pada acara Festival Tradisi Lisan di Bali (pagelaran Wayang Cenk Blonk) dan Festival Tradisi Lisan di NTB (pagelaran Wayang menak) dari target 1.132 peserta menjadi 1.882 peserta.

Pencapaian target Jumlah peserta tersebut dicapai dalam pelaksanaan internalisasi sejarah dan nilai budaya beberapa kegiatan diantaranya:

- Rapat Koordinasi Wilayah Kerja BPNB Bali, NTB, NTT
- 2. Dialog Budaya Bali
- 3. Dialog Budaya NTB
- Dialog Budaya NTT 4.
- 5. Peragaan Tradisi Lisan Bali
- 6. Peragaan Tradisi Lisan NTB
- 7. Peragaan Tradisi Lisan NTT
- 8. Lawatan Sejarah Regional Bali
- 9. Jejak Tradisi Daerah
- Kerja sama Instansi Terkait 10.
- 11. Seminar Hasil Penelitian BPNB Se-Indonesia
- Sosialisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan 12.
- 13. Sarasehan Pesta Kesenian Bali

Sasaran dengan indikator (1) jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan capaian realisai fisik 100% dari 5 naskah dari yang ditargetkan sedangkan keuangan 98,83%; dan (2) Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya capaian realiasi fisik juga 100% dari 3 laporan yang ditargetkan sedangkan realisasi keuangan 95,36%. Hal ini terjadi karena real cost dari pemakaian anggaran khususnya perjadin.

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan sejumlah karakter sebagai keinginan ideal bangsa Indonesia yang diawali oleh 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, , Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sejumlah karakter bangsa lainnya yaitu: bangga sebagai Bangsa Indonesia, berpikir positif, pantang menyerah, gotong-royong, bertoleransi dan menghargai kemajemukan, cinta damai, kejar prestasi, demokratis, kerja keras, anti diskriminatif, menghargai pendapat orang lain, sopan dan santun, rendah hati, sportif, lugas, berani bersaing, setia, satu kata dalam perbuatan, bersih (jujur), hormat kepada yang dituakan, rela berkorban, bermoral dan etis, serta saling percaya.

kebangsaan Merujuk dari pilar Indonesia, pembangunan kebudayaan Indonesia seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-4) terdapat lima pilar pembangunan kebudayaan yaitu: karakter bangsa, pelestarian budaya, penguatan karya dan diplomasi budaya, sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, serta sarana dan prasarana budaya. Upaya pembangunan kebudayaan semakin diperkuat dengan pengintegrasian antara fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, di mana kebudayaan kembali bersatu dalam satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelumnya menyatu yang dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu pula, dalam proses pembangunan Negara sejak tahun 1945 sampai sekarang telah tercatat dalam sejarah pemerintahan terdapat Wakil Menteri yang membidangi kebudayaan, dimana selama ini posisi struktural pemerintahan khusus menangani tertinggi yang kebudayaan adalah seorang Direktur Jenderal. Hal ini membawa kemajuan dan percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas strategis dalam pembangunan kebudayaan Indonesia.

Proses integrasi kebudayaan dalam fungsi pendidikan ini semakin memperkuat sasaran dan arah dari prioritas pembangunan kebudayaan sebagai upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa agar tertanam rasa cinta terhadap bangsa air Indonesia, serta sebagai identitas membedakan ciri bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, tradisi, kesenian, film, dan sejarah merupakan aset bangsa yang tak ternilai sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Kehidupan manusia dalam kesatuan bangsa juga merupakan suatu proses sosial budaya yang setiap saat mengalami perubahan dan pergerakan. Hal tersebut tentu akan menjadi catatan hidup manusia itu sendiri, baik di masa lampau yaitu periode kurun ke kurun sejarah atau pun kejadian di masa sekarang yang mungkin suatu saat akan mengalami perubahan atas dasar keinginan manusia sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, yang menjadikan kebudayaan bersifat dinamis. Pelestarian dan pewarisan nilai budaya yang terkandung dalam warisan budaya baik benda maupun tak benda memilik arti yang sangat penting sebagai bukti akan kemasyhuran masa lalu untuk menuju peradaban bangsa.

Pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam aspek kesejarahan, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, cagar budaya, dan permuseuman merupakan potensi yang sangat baik apabila diintegrasikan dengan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, bidang Kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayan yakni Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perubahan ini telah berdampak tidak

hanya pada nomenklatur kelembagaan serta tugas dan fungsi, tetapi juga berdampak pada pengelolaan aset, kepegawaian, dan penganggaran.

Peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wujud peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014 yang memuat di dalamnya salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan pada tahun 2013 adalah Revitalisasi Taman Budaya, Fasilitasi Kesenian, Restorasi Film, Fasilitasi Film Right, Revitalisasi Museum, Registrasi Nasional Cagar Budaya, dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

C. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
- 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII Pasal 529 sampai 672 menguraikan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Bab I Pasal 1 sampai Pasal 3.

Pasal 1 (1) Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPNB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) BPNB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2 BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPNB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. pelaksanaan pelindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB

Dalam Bab II disebutkan susunan organisasi terdiri atas: BPNB, terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

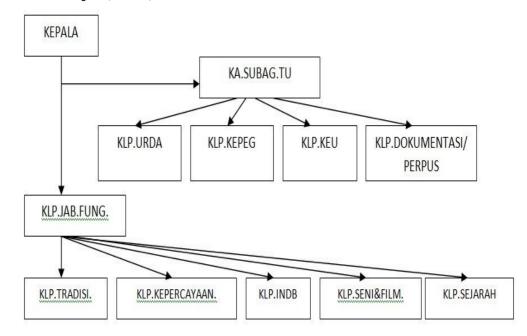
Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Balai per 31 Desember 2013 sebanyak 39 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- 1. Pegawai Gol. I sebanyak 0 orang atau sebesar 0 %.
- 2. Pegawai Gol. II sebanyak 4 orang atau sebesar 10,26 %
- 3. Pegawai Gol. III sebanyak 31 orang atau sebesar 79,49 %
- 4. Pegawai Gol. IV sebanyak 4 orang atau sebesar 10,26 % Untuk melaksanakan tugas fungsional Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali juga didukung Pegawai dengan Jabatan Fungsional Peneliti sebanyak 25 orang.

Struktur Organisasi

Di bawah ini struktur organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut hasil amandemen ke 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945, di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pembangunan kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pembangunan kebudayaan juga memberikan penekanan pada membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Pembangunan kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005.

RPJPN telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus peningkatan kapasitas dan modernisasi: pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang. RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk memantapkan pembangunan Indonesia di segala dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya, memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dan juga dalam rangka membuat pencapaian yang ideal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan review Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan menyusun Renstra 2010-2014 yang mengacu, mendukung, dan melengkapi Renstra Kemendikbud pada periode tahun yang sama.

Renstra bidang kebudayaan 2010-2014 memuat visi dan misi pembangunan kebudayaan yang sejalan dan mendukung visi dan misi Kemendikbud. Renstra ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program-program prioritas dari bidang kebudayaan. Keseluruhan strategi, arah kebijakan, dan program tersebut dalam rangka merespon kondisi umum internal dan eksternal, permasalahan, dan tantangan yang ada. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dalam rangka pembaharuan pendidikan dan kebudayaan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sejak tahun 2012 bidang kebudayaan, yang sebelumnya merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenbudpar, diintegrasikan kembali di bawah Kemendikbud. Paradigma strategi bidang kebudayaan, seperti tercakup dalam Renstra 2010-2014, adalah mengintegrasikan fungsi kebudayaan dengan pendidikan. Dalam hal ini, integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan "merging" fungsi kebudayaan dan pendidikan. Integrasi harus berangkat dari tujuan untuk mempercepat upaya membangun insan Indonesia yang berpengetahuan berbudaya (beradab).

Pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan

Sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan diperlukan peningkatan pelayanan kebudayaan melalui:

- a. Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan;
- b. Pembenahan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan;
- c. Pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia;
- d. Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKN;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Untuk memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitasi Sanggar/Komunitas Adat/Sasana Sarasehan, sarana untuk Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, kegiatan berupa pemberian fasilitasi berdasar standar dan kriteria yang jelas sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi. Selain itu juga, media belajar untuk peserta didik secara langsung seperti museum, cagar budaya, dan taman budaya juga dilakukan revitalisasi sehingga dapat digunakan lebih optimal oleh peserta didik untuk mempelajari dan mengekpresikan kekayaan budaya Bangsa Indonesia.

Dalam kerangka pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi bidang kebudayaan tersebut, maka sejalan dengan integrasi Kebudayaan dan bidang Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu disusun Rencana Strategis Pembangunan Bidang Kebudayaan yang akan menjadi dasar pihak dan arahan

pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan di tahun 2010 -2014.

1. Visi dan Misi

Pembangunan Kebudayaan di Indonesia memiliki Visi:

"MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA".

Hal-hal yang dapat dijelaskan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Memperkuat identitas kebudayaan **MEMPERKUKUH**

dan jatidiri bangsa

Keseluruhan gagasan, perilaku, dan

hasil karya manusia yang

dikembangkan melalui proses belajar

dan adaptasi terhadap

lingkungannya yang berfungsi

sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara di Indonesia

Gagasan, cara pandang, kebijakan,

penyikapan, tindakan masyarakat serta negara terhadap kesadaran

pluralitas keagamaan dan

kebudayaan untuk mengembangkan

semangat kebangsaan

Mampu mengangkat citra dan posisi

bangsa dalam konteks pergaulan

dunia

BERMARTABAT

MULTIKULTUR

KEBUDAYAAN

INDONESIA

MENJADI **KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA**

Mendapatkan pengakuan dan penghargaan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun dunia internasional

MISI BIDANG KEBUDAYAAN

Berdasarkan Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dipakai juga di Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, maka pembangunan kebudayaan di (BPNB) dengan sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan pemahaman dan ketahanan budaya masyarakat yang multikultur.
- 2. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pengemasan, aspek nilai budaya, kesejarahan,kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seni dan film.
- 3. Meningkatkan pendokumentasian dan memasyarakatkan hasil kajian aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan, seni dan film.

2. Tujuan Rencana Strategis

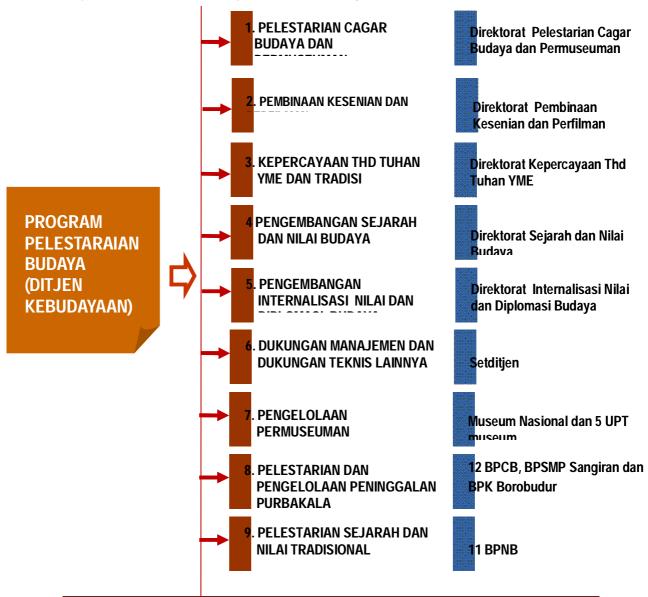
1. Meningkatkan pemahaman dan ketahanan budaya masyarakat yang multikultur	2. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pengemasan, aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seni dan film	3. Meningkatkan pendokumentasian dan memasyarakatkan hasil kajian aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan, seni dan film.
--	---	--

3. Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	1.1. Meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya	2.1. Meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya	3.1. Meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai- nilai budaya/ kebangsaan
SASARAN	1.2. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya	2.2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	

4. Program dan Kegiatan Tahun 2013

Program-program Pembangunan Bidang Kebudayaan di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan ini melingkupi: (1) Pelestarian cagar budaya dan permuseuman; (2) Pembinaan kesenian dan perfilman; (3) Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi; (4) Pembinaan sejarah dan nilai budaya; (5) Internalisasi nilai dan diplomasi budaya; (6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (7) Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala; (8) Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya; dan (9) Pengelolaan Permuseuman.



Program Pelestarian Budaya dapat dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
- 2. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Perfilman
- 3. Kegiatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
- 4. Kegiatan Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya
- 5. Kegiatan Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
- 6. Kegiatan Pengelolaan Permuseuman
- 7. Kegiatan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
- 8. Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
- 9. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Untuk UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya termasuk pada kegiatan point 2, 3, 4, 5, dan lebih terkait lagi dengan point 8 Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Kegiatan Pelestraian Sejarah dan Nilai Tradisional

Kegiatan ini bertujuan peningkatan penulisan/pengkajian, inventarisasi, dan internalisasi sejarah dan nilai dokumentasi. tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta nilai budaya
- 2. penguatan jati diri dan karakter bangsa dengan penggalian nilainilai luhur budaya bangsa

Sasaran strategis kegiatan pelestarian sejarah dan nilai tradisional adalah:

- 1. meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sejarah serta nilai budaya (multikultur);
- 2. meningkatnya inventarisasi penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya;

3. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya.

Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

- Penelitian dan penyebarluasan naskah hasil kajian sejarah dan nilai budayaa
- 2. Inventarisasi dan penyebarluasan karya budaya yang diinventarisasi
- 3. Internalisasi/Apresiasi Nilai Budaya

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
8	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional					
8.1	Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya	Naskah	8	5	6	
8.2	Dokumen pelestarian nilai budaya	Dokumen		2	2	
8.3	Karya Budaya yang diinventarisasi	Karya Budaya	5	4	3	
8.4	Peserta Internalisasi Nilai Budaya	Peserta		1.132	925	
8.5	Peserta Bimbingan Teknis Pelestarian Nilai Budaya	Peserta		4		
8.6	Layanan Perkantoran	Bulan layanan		12	12	
8.7	Kendaraan Bermotor	Unit		4	3	
8.8	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit		34	15	
8.9	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit		63	34	
8.10	Gedung/Bangunan	M2		394	94	

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Program pelestarian budaya bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pelestarian kekayaan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut Rencana Kinerja Tahun 2013 Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL: RENCANA KINERJA TAHUN 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Anggaran 2013 (ribu rupiah)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pelestarian terhadap aspek- aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	Jumlah kajian tentang aspek- aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	Naskah	5	1.045.310
		Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	Karya Budaya	4	885.997
		Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	Peserta	1.132	1.834.983

C. PENETAPAN KINERJA

Untuk mencapai Rencana Kinerja Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas dilakukan kegiatan dan aktivitas yang dikuatkan dengan penetapan kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pembangunan kebudayaan dengan menggunakan anggaran APBN tahun 2013 mengacu kepada Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, dilakukan penetapan kinerja/kontrak kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dengan target capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2013	Anggaran 2013 (ribu rupiah)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pelestarian terhadap aspek- aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	Jumlah kajian tentang aspek- aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	Naskah	5	1.045.310
		Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	Karya Budaya	4	885.997
		Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	Peserta	1.132	1.834.983

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Pelestarian budaya sebagai rangkaian kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kebanggaan, penghargaan, dan keikutsertaan masyarakat terhadap pengembangan sejarah dan nilai budaya, pembinaan kesenian dan perfilman, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, internalisasi nilai dan diplomasi budaya, dan pelestarian sejarah dan tradisional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan kinerja dan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2013 dan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis tahun 2013 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan akuntabilitas kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja utama yaitu membandingkan rencana kinerja tahun 2013 dengan realisasi output dan outcomenya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2013, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kabijakan di masa datang.

Berikut ini diuraikan realisasi pencapaian sasaran Program Pelestarian Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2013 yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target capai kinerja tahun 2013 sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA UTAMA PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diukur/dilihat dari tingkatan ketercapaian Indikator Kinerja Utama Program Pelestarian Budaya, sebagai berikut:

Sasaran strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film

Sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya diukur dengan indikator kinerja. Capaian kinerja utama tersebut diuraikan dalam matrik berikut ini.

Matrik

Perbandingan Sasaran strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film

Sasaran Stratogis	Indikator Kinaria IItarra		Targe	t Tahun 201	2	Targe	t Tahun 201	3
Sasaran Strategis	11 1	dikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan pelestarian terhadap aspek- aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	1	Jumlah kajian tentang aspek- aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	8	8	100	5	5	100
	2	Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	5	5	100	4	4	100
	3	Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	830	1.330	160	1.332	1.882	166

CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI TA 2013

	Sasaran Srategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Dalam ribuan)	Target Kinerja		Realisasi (Dalam ribuan)	%
1	Peningkatan pelestarian terhadap aspek- aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	1.	Jumlah kajian tentang aspek- aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	5 Naskah	1.045.310	5 Naskah	100,00	1.033.051	98,83
		2.	Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	4 Karya Budaya	885.997	4 Karya Budaya	100,00	884.846	95,36
		3.	Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	1.132 peserta	1.834.983	1.882 peserta	166,25	1.712.676	93,33

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

Sasaran Strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film, capaian realisasinya didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja. Satu (1) indikator kinerja capaian realisasi: indikator (3) jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya melebihi terealisasi 166,25 % yaitu: Jumlah peserta atau orang yang hadir pada acara Festival Tradisi Lisan di Bali (pagelaran Wayang Cenk Blonk) dan Festival Tradisi Lisan di NTB (pagelaran Wayang menak) dari target 1.132 peserta menjadi 1.882 peserta.

Pencapaian target Jumlah peserta tersebut dicapai dalam pelaksanaan internalisasi sejarah dan nilai budaya beberapa kegiatan diantaranya:

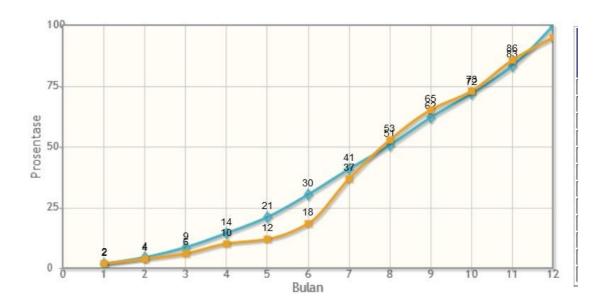
- 1. Rapat Koordinasi Wilayah Kerja BPNB Bali, NTB, NTT
- 2. Dialog Budaya Bali
- 3. Dialog Budaya NTB
- 4. Dialog Budaya NTT
- 5. Peragaan Tradisi Lisan Bali
- 6. Peragaan Tradisi Lisan NTB
- 7. Peragaan Tradisi Lisan NTT
- 8. Lawatan Sejarah Regional Bali
- 9. Jejak Tradisi Daerah
- 10. Kerja sama Instansi Terkait
- 11. Seminar Hasil Penelitian BPNB Se-Indonesia
- 12. Sosialisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan
- 13. Sarasehan Pesta Kesenian Bali

Sasaran dengan indikator (1) jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan capaian realisai fisik 100% dari 5 naskah dari yang ditargetkan sedangkan keuangan 98,83%; dan (2) Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya capaian realiasi fisik juga 100% dari 3 laporan yang ditargetkan sedangkan realisasi keuangan 95,36%. Hal ini terjadi karena real cost dari pemakaian anggaran khususnya perjadin.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.090.492.000, berdasarkan jenis belanja dapat terserap sebesar Rp 8.639.449.558,- atau 95,04%.

Realisasi anggaran tersebut jauh dari target yang direncanakan sebesar 99%. Kendala yang dihadapi adalah terlambatnya penerbitan DIPA oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei 2013 sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2013 terlambat sekitar 5 bulan.



	Anggaran									
BLN	Renca	na	Realisasi							
	Rp.	%	Rp.	%						
1	153.702.000	1,69 %	166.222.307,00	1,83 %						
2	398.679.000	4,39 %	333.578.841,00	3,67 %						
3	775.477.000	8,53 %	541.066.672,00	5,95 %						
4	1.302.753.000	14,33 %	909.421.222,00	10,00 %						
5	1.905.119.000	20,96 %	1.077.775.772,00	11,86 %						
6	2.752.293.000	30,28 %	1.660.519.750,00	18,27 %						
7	3.706.839.000	40,78 %	3.341.300.868,00	36,76 %						
8	4.603.496.000	50,64 %	4.798.708.400,00	52,79 %						
9	5.640.550.000	62,05 %	5.922.322.933,00	65,15 %						
10	6.537.928.000	71,92 %	6.630.673.706,00	72,94 %						
11	7.572.688.000	83,30 %	7.789.831.180,00	85,69 %						
12	9.090.492.000	100.00 %	8.639.449.558,00	95,04 %						

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Utama Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali pada tahun 2013 dengan target sebanyak 3 kinerja utama. Capaian kinerja tersebut sebanyak 1 kinerja utama dapat dicapai melebihi target yang ditentukan, 2 kinerja utama dicapai sesuai target yang ditentukan berdasarkan persentase keuangan, sedangkan secara fisik semua kinerja utama dapat tercapai.

Pencapaian program tersebut memberikan kontribusi langsung dalam pencapaian sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis BPNB Bali tahun 2010--2014. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPNB Bali melaksanakan program yang dititikberatkan pada sasaran strategis peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film pelestarian budaya dalam bidang pendidikan dan Kebudayaan.